

**Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa
Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow**

**Anggreyni Raintung¹
Sarah Sambiran²
Ismail Sumampow³**

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat atau memampukan dan memandirikan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan kelompok tani yang dikembangkan oleh pemerintah sebagai alat pembangunan adalah untuk memanfaatkan secara lebih optimal semua daya yang tersedia serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 4 (empat) Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Arif Dalam Adhawati, yaitu Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Katalisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di desa mobuya belum terlaksana secara optimal dikarenakan kurangnya perhatian oleh pemerintah terhadap kelompok tani, kurangnya keaktifan dan keterlibatan pemerintah secara langsung untuk melihat kendala yang dialami oleh para kelompok tani, baik secara modal, maupun sarana dan prasarana pertanian serta pembagian bantuan yang belum merata bagi kelompok tani.

Kata Kunci : Peran, Pemberdayaan, Kelompok Tani

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Pembentukan kelompok tani merupakan suatu usaha pembangunan pertanian yang berfungsi untuk memperlancar hasil pertanian dan memberikan wadah yang kokoh di pedesaan dan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara para petani dalam kelompok tani. Tujuan dibentuk kelompok tani untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota dan keluarganya. Kelompok tani sendiri merupakan suatu bentuk perkumpulan petani yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyuluhan.

Manfaat itu bisa berupa manfaat sosial ekonomi serta manfaat-manfaat lain yang membawa kemajuan diwilayah pedesaan-pedesaan tersebut yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan dimaksud bukan saja dari segi ekonomi atau pendapatan semata melainkan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat local melalui distribusi peningkatan pendapatan dan penyerahan tenaga kerja local.

desa memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Karena pemerintahan desa secara umum memiliki wewenang yang strategis untuk mengendalikan kehidupan masyarakat atau dengan kata lain pemerintah desa memiliki seperangkat aturan baku yang tertulis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang-Undang Tentang Desa menyebutkan bahwa desa mempunyai empat kewenangan yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul, (rekognisi), kewenangan local berskala Desa (subsidiarity), kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Terutama yang dilihat dari penyelenggaraan pemberdayaan. Yang dimana dalam pemberdayaan

masyarakat desa dapat dikembangkan dengan berbagai cara, diantaranya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, maupun pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa berperan aktif dalam menganalisis dan mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat dalam proses pemberdayaan itu sendiri.

Pemerintah dituntut memberikan pelayanan yang lebih serta memberdayakan masyarakat, agar masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan wilayahnya dan mendapatkan kesejahteraan, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Pemberdayaan kelompok tani sendiri adalah upaya meningkatkan kemampuan dan memandirikan masyarakat tani dalam meraih kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu upaya yang dapat memberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitasnya.

Masyarakat Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, pada umumnya hidup dari bertani dengan potensi kekayaan alam yang menjanjikan. Kegiatan kelompok tani dapat berkembang jika adanya dukungan dari pemerintah yang melihat potensi kelompok tani yang cukup aktif dalam menciptakan inovasi-inovasi yang dapat membawa kemajuan bagi desanya. Dari asset usaha tani yang dikelola, tentunya dapat memberikan manfaat bagi anggota kelompok tani maupun bagi masyarakat.

Namun pada saat ini kondisi kelompok Tani di Desa Mobuya dari tahun ketahun dapat dikatakan belum mengalami suatu perkembangan seperti sesuatu yang diharapkan atau hanya berjalan ditempat. Rendahnya suatu kinerja kelompok tani antara lain disebabkan oleh kurangnya perhatian dari Pemerintah Desa yang ada.

Kenyataan yang terjadi masih banyak anggota kelompok tani yang belum memiliki keterampilan atau kemampuan dan potensi yang begitu baik dalam menjalani dan mengelolah pertanian, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para petani, sehingga kelompok tani tidak bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan dari kurangnya pelatihan, pembinaan, pembimbingan dan penyuluhan untuk bagaimana cara-cara yang seharusnya petani dapat lakukan dalam mengelolah pertanian yang kelompok tani miliki dengan benar.

Selain itu permasalahan yang terjadi yaitu pemberian bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan dari para petani. Pemberian bantuan berupa benih jagung, bibit bawang putih merupakan tanaman yang tidak cocok untuk daerah kami, tanaman unggulan di Desa Mobuya Yang seharusnya jika di cocokan dengan keadaan iklim di desa Mobuya yang lebih tepat adalah tanaman Holtikultura berupa kentang, wortel, batang bawang, cabai, jahe, sawi, tomat, kol dll, serta kurangnya ketersediaan pupuk yang diberikan padahal pupuk adalah kebutuhan dan keberlangsungan petani dalam mengelolah lahan pertanian. Seharusnya jika pemerintah desa berperan aktif dalam memberdayakan ke 11 kelompok tani, baik kelompok tani lumibut, mapalus, embun iloloy, pritama tani, berkatnya, tapatan, harapan, suka maju, dan Kelompok wanita tani. Maka kebutuhan dan keperluan dari para petani dapat terpenuhi.

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow

Tinjauan Pustaka

Pengertian Peran

Dalam kamus Besar Bahasa Peran menurut Abdilsyani (2012 :92) peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai

dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Masyarakat berpendapat bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dan menjalankan suatu peran. Selanjutnya dia menambahkan bahwa peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2012:212), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah seseorang yang mempunyai kedudukan dan menjalankan hak kewajibannya.

Dari sudut pandang yang lain, peran adalah tindakan yang di lakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa (Power wadarminta,1995). Dari sudut pandang yang lain peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa (Power wadarminta,1995). Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dari kewajibannya sesuai dengan kedudukannya ,dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan . keduanya tidak dapat di pisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Dari berbagai pengetian tersebut dapat di tarik kesimpulan mengenai kepentingan peranan dalam hal ini peranan pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan ,pembangunan,pemberdayaan,dan

pengaturan masyarakat .dapat di jelaskan bahwa peranan merupakan sapek dinamis dri kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak atau kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia telah melakukan sebuah peranan.

Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106). Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Maurice Duverger (2010;103) berpendapat bahwa istilah “peran” (role) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor professional. Menurut Maurice Duverger (2010; 102) bahwa peran adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status. Sedangkan Stoetzel dalam Rafael Raga Maran (2007 : 50), mengatakan bahwa “ status adalah pola perilaku kolektif yang secara normal bias diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan peranan adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang”. Sebagaimana halnya dengan kedudukan maka peranan juga tidak terpisahkan pada diri manusia. Pada hakekatnya manusia mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini mengandung arti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Berdasarkan pengertian peran diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan atas aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut

dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

Pemerintah Desa

Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan kebijakan program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Pemerintahan desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republic Indonesia. Latar belakang berdirinya sebuah pemerintahan desa di sebuah wilaya hakekatnya ialah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya.

Menurut Surasih, (2002:23). Pemerintah Desa merupakan bagian dari Pemerintah Nasional yang penyelenggaraannya ditunjukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam hal ini Peran Pemerintah Desa mengarahkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang adil dan dapat bertanggung jawab. Sebagimana diketahui bahwa salah satu tugas pemerintah adalah melaksanakan pembangunan disegalah bidang termasuk didalamnya pembangunan fisik desa. Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat termasuk didalamnya masyarakat desa.

Menurut Arif dalam Adhawati (2012:9) Peran Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi empat peran yaitu :

- 1) Peran Pemerintah sebagai Regulator yaitu;

- 2) Peran Pemerintah sebagai Dinamisator yaitu;
- 3) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator yaitu;
- 4) Peran Pemerintah sebagai Katalisator yaitu;

Pemberdayaan

kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dimaknai sebuah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2004:7).

Menurut Suharto (2006:59), pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok).

Menurut Handini, dkk (2019: 12-14) konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Terkait dengan pemahaman ini pemberdayaan kontenks

masyarakat adalah kemampuan individu dalam bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Kelompok Tani

Pada dasarnya pengertian kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka bagian dari kelompok tersebut.

Menurut Mulyana (2005:23) kelompok pada dasarnya adalah gabungan dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama, dimana interaksi yang terjadi bersifat relatif tetap dan mempunyai struktur tertentu.

Menurut Mardikanto (1996:435) pengertian kelompok tani adalah sebagai kumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri atas petani dewasa maupun petani taruna yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani.

Kemudian menurut Wahyuni (2003; 2) kelompok tani merupakan wadah komunikasi antar petani, serta wadah komunikasi antar petani dengan kelembagaan terkait dalam proses alih teknologi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati (Sugiyono, 2007:15).

Adapun fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya

Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang. Yang dapat dilihat dari Peran Pemerintah Menurut Menurut Arif dalam Adhawati (2012:9)

- 1) Peran Pemerintah sebagai Regulator.
- 2) Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator.
- 3) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator.
- 4) Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Informan dalam penelitian ini :

- 1) Pemerintah Desa 2 Orang
- 2) PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) 1 Orang
- 3) Ketua Gapoktan 1 Orang
- 4) Anggota Kelompok Tani (5 Orang)
- 5) Petani 1 Orang

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah Data Primer yang meliputi Observasi, Wawancara kemudian data sekunder yakni studi pustaka.

Pembahasan

Program Keluarga Harapan ini Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani dapat di lihat dari beberapa peran pemerintah baik sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator. Untuk dapat melihat seberapa aktif peran pemerintah desa maka peneliti menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Arif dan Adhawati (2012;9) yaitu :

Peran Pemerintah sebagai Regulator.

Peran sebagai regulator Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (Menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tata tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator pemerintah desa membuat aturan dan program-program tentang pemberdayaan kelompok tani, memberikan acuan dasar yang selanjutnya dapat diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrument untuk boleh dapat mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dalam kelompok tani yang ada.

Peran pemerintah yang paling terasa salah satunya adalah di bidang pembuatan kebijakan yang

mempengaruhi secara keseluruhan. Melalui regulasi pemerintah, pada tingkat pertanian sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya pengelolaan kegiatan pertanian masyarakat dalam menciptakan inovasi-inovasi yang baru dalam pertanian.

Dalam pemberdayaan petani pemerintah desa telah melakukannya dengan terbentuknya gabungan kelompok tani dan berupa pemberian penyuluhan dan palatihan yang dilakukan oleh pemerintah lewat PPL untuk memberdayakan petani di Desa Mobuya. Pembentukan gapoktan untuk menunjang aktivitas pertanian masyarakat, sehingga memudahkan pemerintah menyalurkan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah masih dirasakan sulit oleh masyarakat dikarenakan belum adanya aturan dan arahan dari pemerintah tersebut.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator

Dalam pelaksanaan peran sebagai Dinamisator pemerintah desa memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, mampu dalam mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan.

Kemudian kendala yang dirasakan masyarakat dalam kegiatan kelompok tani yaitu dalam pembagian bantuan yang ada tidak diberikan secara merata terhadap semua kelompok tani. Pemberian bibit yang unggul yang tidak sesuai dengan lingkungan yang ada di desa sehingga mempengaruhi hasil produksi petani. Serta kendala yang dirasakan pemerintah yaitu kurang minatnya petani mengikuti berbagai sosialisasi pertanian, penyuluhan dan pelatihan.

Pemerintah dituntut dapat mengatasi kendala yang dirasakan kelompok tani dan mampu memberikan motivasi untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam kelompok tani serta memperhatikan

setiap keluhan dari anggota kelompok tani.

Pemerintah sebagai penggerak sangat efektif membangun kegiatan pertanian masyarakat, karena sensitifitas kelompok tani dapat mempengaruhi lingkungannya sendiri, maka peran pemerintah untuk memberikan motivasi dan bimbingan sangat dibutuhkan sehingga mampu mempengaruhi kelompok tani untuk memperbaiki lingkungan dan mutu hidupnya. Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan.

Upaya pemberdayaan tersebut dilakukan agar dapat mempengaruhi aktivitas pertanian di masyarakat, sehingga mampu mengubah lingkungan hidup masyarakat kearah yang lebih baik yaitu kelompok tani yang mandiri dan mampu bersaing di dunia pasar. Untuk menunjang keberhasilan pemberdayaan, pemerintah desa harus mampu menjadikan dirinya terus-menerus aktif bergerak dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah desa yang secara demokratis mampu membangkitkan dan menggerakkan komponen dalam dan luarnya aktif dalam usaha-usaha pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pemerintah sebagai dinamisor telah berupaya mempengaruhi masyarakat untuk ikut dalam pemberdayaan masyarakat guna menunjang keberhasilan aktivitas pertanian yang ada di Desa Mobuya, dengan membentuk kelembagaan pertanian berupa Gapoktan, melalui rapat evaluasi anggota kelompok tani memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada petani agar aktivitas pertanian kelompok tani bisa berjalan baik. Namun sangat disayangkan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan petani yaitu pemberian bantuan yang tidak sesuai dengan sasaran, karena pembentukan kelompok tani tidak dipisahkan sesuai dengan keperluan petani. Sehingga membuat partisipasi anggota kelompok tani dalam

kegiatan penyuluhan dan pelatihan sangat rendah.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator pemerintah desa bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal, kepada masyarakat. Pemerintah Desa Mobuya telah memberikan apa yang telah diberikan pemerintah daerah kepada kelompok tani berupa alat pertanian, kemudian juga telah memberikan bantuan benih jagung dan pupuk bersubsidi.

Namun itu semua belum mampu mengoptimalkanke kebutuhan anggota kelompok tani, karena belum terciptanya kerja sama antara pemerintah dan petani dalam melaksanakan kegiatan pertanian yang ada. Karena bebarapa anggota kelompok tani sudah mendapatkan bantuan baik berupa pupuk bersubsidi, alat pertanian ataupun bibit, namun anggota kelompok tani yang lain belum mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan.

Peran pemerintah sebagai fasilitator sangat penting dalam menunjang kegiatan pembangunan yang ada di desa, fasilitas bukan hanya berfokus pada pemberian sarana tapi juga harus memperhatikan prasarana yang ada karena kurangnya prasarana seperti pupuk sangat berpengaruh terhadap jalannya pertanian yang ada, karena masalah pupuk di Indonesia merupakan permasalahan yang menyentuh langsung kebutuhan dan keberlangsungan lahan pertanian, selain itu pemerintah juga harus mampu memberikan bimbingan teknis dan non teknis terus menerus kepada kelompok tani yang sifatnya mendorong dan memberdayakan kelompok tani agar mereka dapat merencanakan, membangun dan mengelola sendiri sarana dan prasarana pemberdayaan, serta mampu melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Katalisator

Pemerintah sebagai katalisator pemerintah desa berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi desa. Dimana hal ini berkaitan dengan pemerintah desa dalam melihat dan mengkoordinir langsung factor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan.

Dalam rangka mengoptimalkan peran pemerintah sebagai katalisator pemerintah juga perlu mendorong partisipasi pihak lain yang kompeten dalam pembangunan prasarana dan sarana pembangunan, seperti pihak swasta dan swadaya masyarakat. Pemerintah juga perlu mendorong terjadinya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Penting juga diperhatikan adalah kesiapan pemerintah desa dalam menyediakan modal bagi kelompok tani.

Penutup

Kesimpulan

1. Dengan terbentuknya Gapoktan dapat dilihat bahwa peran pemerintah sebagai regulator sudah berjalan tapi belum. Namun untuk aturan yang berkaitan khusus dengan kegiatan gapoktan Pemerintah desa sendiri belum membuatnya. Pemerintah hanya menjalankan aturan yang ada dalam UU No 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Mobuya telah menjalankan tugasnya sebagai regulator walaupun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pembuatan aturan dan program yang ada.
2. Sebagai Dinamisator pemerintah desa memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dan mampu dalam mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat atau partisipasi aktif dalam setiap pembangunan. Namun partisipasi dari anggota kelompok tani sendiri dalam kegiatan

kelompok tani seperti penyuluhan dan pelatihan masih sangatlah rendah dilihat dari kehadiran masyarakat yang sangat sedikit, hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi dan keaktifan dari pemerintah sendiri.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator dapat dikatakan belum berjalan secara optimal, dikarenakan kurangnya berbagai bantuan serta tidak meratanya pembagian fasilitas yang diberikan kepada kelompok tani. Kemudian kurangnya perhatian dari pemerintah baik dari penyediaan fasilitas penyuluhan ataupun pelatihan kepada kelompok tani.
4. Pemerintah sebagai katalisator belum terlaksana dengan baik karena pemerintah kurang memperhatikan hal-hal yang mendorong laju perkembangan seperti sumber daya alam, sumber daya manusia yang unggul, serta kurangnya penyediaan modal

Saran

1. Untuk Pemerintah Desa kiranya dalam pemberian sosialisasi program terhadap petani lebih digiatkan lagi, serta tepat sasaran agar petani dapat bekerja dengan baik. Untuk pelatihan kiranya juga dapat diperhatikan dengan baik serta pemberian bantuan kiranya dapat diberikan secara merata agar tidak terjadi persaingan dalam bertani.
2. Diperlukan keaktifan dan pertahian yang lebih dari Pemerintah Desa untuk melihat dan memenuhi setiap
3. keperluan kelompok tani, seperti mampu penyediaan fasilitas serta pemberian bantuan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok tani agar dapat meningkatkan kapasitas bertani serta hasil pertanian dapat lebih banyak dan lebih menjanjikan.
4. Untuk Kelompok Tani kiranya kekompakan lebih ditingkatkan lagi agar dapat meningkatkan kinerja secara bersama-sama guna mencapai tujuan bersama dalam kesejahteraan anggota kelompok tani.

5. Kiranya anggota kelompok tani lebih banyak lagi melibatkan diri dalam kegiatan kelompok tani seperti penyuluhan, pelatihan dan lain sebagainya agar boleh mendapat atau menambah pengetahuan dan keterampilan dalam bertani..

Daftar Pustaka

Amanah S, Farmayani N. (2014). *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan Keunikan Agrekosistem Dan Daya Saing*. Jakarta: Departemen Sains Komunikasih Dan Pengembangan Masyarakat

Andi Tenri Nippi, dan Andi Pananrangi M. (2019). *Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani*. Jurnal Meraja. Volume 2, no 1.

Chazienul M U. (2016). *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*. Malang: UB Press

Dini Ajeng Utami. (2019). *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.

Iman Gunawan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.

Inu Kencana Syafiie. (2013). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama

Kiswanto. (2018). *Menggerakkan Kelompok Tani Mandiri*. Yogyakarta: Rubrik.

L Oktavia, P Sofie, Rahman I. 2019. *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pembangunan Pertanian*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.ejournal.unsrat.Diunduh 15 Desember 2020

Mariana Thania Ambun, 2020 *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Bleberan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi.Yogyakarta: APMD Yogyakarta.

Mardikanto, Soebianto. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung Alfabeta.

Soekanto, & Soerjono. (2012:212). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers..

Suhardono Edy.(1994). *Teori Peran Konsep Deriasi Dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Suharsaputra, Uhar. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan Tindakan* Bandung: PT Refika Aditama.

Sumber Lainnya :

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.67/PERMENTAN /SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.